BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Maka dapat dikatakan bahwa setiap aktor negara pasti akan melakukan sebuah interaksi diantara para aktor negara yang satu dengan aktor negara lainnya sebagai bentuk eksistensi dalam hubungan internasional karena dengan terjadinya hubungan internasional akan memicu rasa saling ketergantungan (interdependensi) yang disebabkan semakin bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dari hal tersebutlah yang akhirnya akan memicu suatu bentuk kerjasama diantara aktor-aktor tersebut (Perwita dan Yani, 2005:3-4).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup berbagai hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi dan penggunaan kekuatan militer serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Hubungan antar negara juga sering didasari oleh adanya persamaan di antara negara – negara tersebut. Mulai dari persamaan bahasa, geografi, ideologi, sampai persamaan kepentingan politik dan ekonomi (Rudy, 2002:5)

Dalam hal ini masalah perbatasan merupakan masalah yang kerap dihadapi. Tumpang tindih pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat

mengarah pada konflik Internasional. Kaitannya dengan Hubungan Indonesia, Malaysia dan Singapura, masalah perbatasan dapat terlihat dari kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan termasuk Malaysia begitu penting karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara negara negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan.

Selat Malaka sebagai salah satu *choke point* strategis di kawasan Asia Tenggara memiliki arti penting bagi negara-negara sekitarnya, khususnya dari segi ekonomi. Tidak mengherankan jika banyak sekali aktor yang ingin menanamkan dominasinya kepada selat ini, baik aktor intra maupun ekstra kawasan. Beragamnya kepentingan yang terlibat tak pelak mengakibatkan terjadi ketegangan-ketegangan yang berujung pada konflik. Sejumlah negara yang menyadari akan potensi konflik ini berupaya melakukan tindakan preventif demi mengamankan kawasan perairan Selat Malaka, mengingat ketidak kondusifan keamanan kawasan ini akan berimbas pada konstelasi keamanan secara domestik maupun regional.

Peneliti memandang bahwa konstelasi keamanan Selat Malaka masih diwarnai sejumlah konflik tanpa batas dan kejahatan transnasional (*sea piracy*). Seiring globalisasi, nilai Selat Malaka ini akan terus bertumbuh dengan intensitas perdagangan yang kian meningkat. Pertempuran kepentingan dan upaya perluasan *sphere of influence* diprediksi masih akan terjadi di selat ini, mengingat banyaknya keuntungan yang menggiurkan dari nilai strategis yang ditawarkannya. Wacana masalah Selat Malaka sempat diinternasionalisasikan, namun batal

karena cukup negara-negara pantai yang menjaga perairan tersebut, yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia. Selat Malaka di anggap begitu penting karena merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan.

Arti penting Selat Malaka semakin bertambah dengan diproduksinya kapal-kapal tanker raksasa untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah melewati Selat Malaka ke negara-negara Timur Jauh, terutama Jepang 90% kebutuhan minyaknya diangkat melalui Selat Malaka, di samping itu juga, Selat Malaka merupakan jalur air penting untuk kegiatan pelayaran dengan berbagai macam dagangan ekspor/impor dari berbagai negara. Panjang Selat Malaka 500 mil dengan lebar 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu selat philips di Selat Singapura. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga negara berpenduduk terpadat di dunia, yaitu Indonesia, China, dan India. Sebanyak 50.000 kapal melintas di Selat Malaka setiap tahunnya, yang mengangkut seperlima atau seperempat perdag angan dunia (http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_content &task=view&id=22 diakses pada 10 Mei 2016).

Akibatnya, perairan Selat Malaka makin padat. Selat Philips (Singapura) yang berada di titik sempit di Selat Malaka adalah salah satu kemacetan laut dunia. Namun, nilai strategis Selat Malaka juga dibarengi dengan kerawanannya,

terutama perampokan atau ancaman terorisme laut, Pada tahun 2003 telah terjadi 150 kasus penyerangan/perampokan di Selat Malaka, negara-negara besar telah menyatakan keinginannya untuk terlibat mengamankan Selat Malaka, seperti AS, India atau Jepang, namun ketiga negara pesisir yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura menyatakan bahwa kawasan ini merupakan wilayah mereka dan merekalah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah tersebut (http:// www.antaranews.com/print/64207/selat-malaka-kini-lebih-aman diakses pada 4 Maret 2016).

Wilayah perairan sepanjang Selat Malaka memiliki banyak kerawanan, di samping rawan terhadap kerusakan lingkungan, wilayah tersebut juga rawan terhadap pelanggaran wilayah, rawan terhadap penyelundupan, rawan terhadap pencurian sumber daya laut, rawan terhadap penyelundupan narkotika, dan rawan terhadap perampokan/pembajakan laut. Dari sisi ekonomi dan kestrategisan, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, seperti halnya Terusan Suez dan Panama. Lebih dari 50 ribu kapal pertahun melintasi Selat Malaka. Kapal-kapal tanker diperkirakan mengangkut 11 juta barel minyak perhari melalui selat ini pada tahun 2003, terutama untuk tujuan Jepang seiring berkembangnya perekonomian Cina, negara berpenduduk terbanyak di dunia itu juga tumbuh menjadi pengimpor minyak terbesar dunia.

Kejahatan yang ada di Selat Malaka salah satunya adalah *Piracy* dimana Kapal global mars adalah kapal berbendera Panama dan membawa kargo enam ribu metrik ton produk minyak sawit. Global mars dibajak oleh sekelompok perompak sehari setelah berlayar dari Malaysia pada Februari 2000. Perompak

membawa senjata api dan pedang ketika menaiki kapal. Mereka menutup mata awak kapal sebelum memindahkan awak kapal ke kapal nelayan untuk dibawa ke Pulau Surin, Thailand. Selanjutnya penyelidik menemukan kapal ini dan kapal diketahui telah diganti namanya menjadi bulawan dan diregistrasi di Honduras. Diperkirakan 2500 metrik ton minyak kelapa sawit masih berada di kapal Global Mars. Selain dari itu Sementara itu, Pada Maret 2003 sekelompok pembajak menaiki kapal tanker berisi bahan kimia, Dewi Madrim, saat melewati Selat Malaka dekat perairan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Para pembajak mengikat awak kapal dan mengambil kemudi kapal selama beberapa jam sebelum meninggalkan perlengkapan dan dokumen kapal. Penyerangan terhadap kapal Dewi Madrim di Selat Malaka adalah salah satu contoh peningkatan pasang surutnya kejahatan yang telah mengubah salah satu jalur perairan yang paling sibuk di dunia menjadi yang paling berbahaya. Dan yang terakhir, Pada bulan Mei tahun 2011 kapal tanker High Mercury dibajak oleh sekelompok perampok ketika berlabuh di Dumai, Indonesia. Perampok masuk melalui geladak kapal dan menyandera nakhoda ketkapal ke tiga. Perampok memasuki ruang mesin dan mencuri properti kapal. Tukang minyak mesin melihat kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke angkatan laut Indonesia dan polisi laut akan tetapi perampok kapal kabur (Sittnick, 2005:1)

Selat Malaka yang berada di kawasan perbatasan antara Indonesia Malaysia dan Singapura tentu memiliki arti penting bagi ketiga negara ini karena Selat Malaka merupakan titik penting bagi Indonesia. Bukan hanya dalam era kekinian saja selat ini memiliki posisi penting dalam geopolitik Indonesia. Sejak ratusan

tahun silam, selat ini telah berperan terhadap pembentukan sejumlah daerah pesisir di Sumatera, misalnya Aceh dan Sriwijaya. Sejak itu pula Selat Malaka berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kawasan tersebut. Posisi Indonesia yang dipandang sebagai salah satu kawasan strategis menjadikannya sebagai jalur perpanjangan perlintasan minyak dan komoditas lain dari Selat Malaka.

Sementara itu, Selat Malaka juga memiliki arti penting bagi Malaysia mengingat lebih dari setengah kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Malaysia ditempatkan di selat tersebut Malaysia mengklaim bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari perairannya yang berarti selat tersebut merupakan bagian dari kedaulatannya. Berkaitan dengan Selat Malaka, Malaysia juga merespon baik adanya rencana pembangunan jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Pulau Rupat, Indonesia, dengan Teluk Gong, Malaysia. Dengan dibangunnya mega proyek jembatan ini, devisa negara dipastikan akan mengalami lonjakan.

Sementara itu mengingat Singapura merupakan negara yang kecil dari segi luas wilayah, maka kewaspadaannya terhadap negara lain menjadi tinggi. Namun hal inilah yang menjadikan Singapura memiliki mentalitas baja dalam mempertahankan wilayahnya. Sehingga tidak mengherankan jika negara ini begitu *concern* pada pertahanan negaranya melalui pemberlakuan anggaran pertahanan yang sangat besar. Nilai penting Selat Malaka bagi negara ini bisa dlihat dari segi ekonomi dan strategis, navigasi, sumber daya laut, dan pariwisata (http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/law.nus.edu.sg/ContentPages/4359316.pdf diakses pada 24 Mei 2016).

Pembajakan kapal di Selat Malaka telah menjadi masalah yang sangat penting mengingat meningkatnya kasus pembajakan di wilayah tersebut. Salah satu bentuk interaksi dalam hubungan internasional adalah melalui kerjasama internasional. Suatu kerjasama antar negara dilakukan dengan tujuan untuk dapat memenuhi *national interest* mereka masing-masing. Bentuk dari kerjasama antar negara memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain dari sektor ekonomi, politik, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Kerjasama tersebut biasanya meliputi hal-hal atau isu-isu tertentu atau spesifik yang tengah dialami oleh negara-negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Salah satu kerjasama antar negara yang sering menjadi sorotan adalah kerjasama antar negara di bidang pertahanan keamanan di kawasan Selat Malaka.

Jika ditinjau dari kerjasama keselamatan pelayaran, ketiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah sepakat pada pertemuan konsultasi di Jakarta, yaitu ketiga negara berupaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura, pertemuan ini berhasil meletakkan dasar-dasar bagi pertemuan berikutnya yaitu perlunya mengadakan *Traffic Separation Scheme* (TSS), membentuk badan kerja sama tiga negara pantai serta melanjutkan survey hidrografis untuk melengkapi data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya (http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf di akses pada 1 Maret 2016).

Kerjasama Internasional adalah elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Melalui kerjasama internasional, Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang untuk menunjang dan

melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara ditegaskan bahwa pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia terkait erat dengan kosep dasar yang kita anut dalam Negara Kesatua Republik Indoesia (NKRI) . Ketika NKRI dimaknai sebagai suatu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dan wilayah, maka segala bentuk tafsir atau persepsi terhadap ancaman yang dihadapi tidak lepas dari tanggung jawab negara melindungi elemen-elemen tersebut secara tidak terpisah. Negara tidak dapat mengabaikan atau mengutamakan salah satu dari elemen kedaulatan, penduduk dan wilayah dalam kebijakan dan aktivitas terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan RI, terutama wilayah Selat Malaka (Djani, 2008:1).

Langkah selanjutnya adalah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri ketiga negara pantai di Singapura yang telah membahas tentang keselamatan pelayaran di Selat Malaka dengan membicarakan tentang tindakan yang perlu di ambil untuk meningkatkan pelayaran di Selat Malaka, dan masalah pembentukan badan koordinasi yang akan mengkordinasikan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keselamatan pelayaran (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=22670 diakses pada 1 Maret 2016).

Pengamanan Selat Malaka juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam konferensi keamanan Asia di Singapura pada 4-5 Juni 2005 lalu. Namun negara-negara pantai di Selat Malaka, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia, telah menyatakan dengan tegas bahwa negara-negara pantai yang bertanggung

jawab atas pengamanan Selat Malaka, terutama di bidang peralatan dan Informasi (http://www.antaranews.com/print/64207/selat-malaka-kini-lebih-aman diakses pada 29 Februari 2016).

Sebagai suatu negara yang berdaulat sudah tentu Indonesia, Malaysia dan Singapura juga memiliki strategi keamanan dan pertahanan di perbatasan untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang mungkin terjadi, seperti sengketa perbatasan, penyelundupan, pembajakan, terorisme, *human trafficking*, *ilegal fishing* dan berbagai permasalahan lainnya di Selat Malaka. Wilayah ini menjadi target bagi para kriminal karena wilayah ini merupakan jalur strategis perdagangan beberapa negara diantaranya Jepang Australia, bahkan negara-negara di Afrika. Menurut data *Internationl Chamber of Commerce,* sekitar hampir 50.000 kapal transit melalui Selat Malaka dan diperkirakan telah mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia (https://www.kemlu.go.id/Majalah/Akses%20Vol%207%20Des%20207%220%20Feb%202008.pdf. diakses pada 28 Maret 2016).

Melihat rawannya keamanan Selat Malaka, melalui beberapa inisiatif, telah dilakukan pemantauan dari patroli bersama ketiga negara pesisir yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura yang beroperasi dibawah struktur komando yang terkoordinasi dengan nama *Malacca Strait Patrol* (MSP) dan diikiuti oleh beberapa program diantaranya *Malacca Sea Strait Patrol* (MSSP) atau *Malacca Straits Security Initiative* (MSSI), operasi terdiri dari alokasi kapal untuk patroli di Selat Malaka dan bertujuan untuk mengurangi pembajakan dan aktifitas penyelundupan yang terjadi di Selat Malaka. Pada saat operasi pertama berjalan

tujuh belas kapal ditugaskan untuk berpatroli di selat ini. Indonesia mengirim tujuh kapal sedangkan Malaysia dan Singapura mengirimkan masing-masing lima kapal.

Selain itu ada juga *"Eyes In The Sky "* (EiS) merupakan bagian dari *Malacca Strait Patrol (MSP)*. Dalam perkembangannya, operasi ini diperluas bersama TNI Angkatan Udara dan menghasilkan kerjasama bersama di udara oleh ketiga negara penjaga selat. Selanjutnya, program ini menjadi bagian terintegrasi dengan nama Operasi *Eyes in the Sky* dalam mengamankan perairan Selat Malaka. Usulan terkait patroli *Eyes in the Sky* pertama kali diusulkan oleh Deputi Perdana Menteri Malaysia dalam sebuah dialog yang diadakan pada tahun 2005. Patroli keamanan ini adalah sebuah konsep untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka dan Singapura. Wilayah operasi ini mencakup wilayah udara nasional dan internasional di atas Selat Malaka. Sebuah pusat operasi *Eyes in the Sky* didirikan di setiap negara yang berpartisipasi untuk mengkoordinasikan jadwal patroli. Pada tahap awal, setiap negara yang berpartisipasi akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam hal ini pesawat untuk patroli laut (http://seskoal.tnial. mil.id/musik/DW1512011(finish%20UTUH).pdf diakses pada 29 Juni 2016).

Eyes in the Sky merupakan patroli udara maritim yang dilakukan oleh littoral state ditambah dengan Thailand. Untuk memudahkan upaya untuk menekan tindak kejahatan laut di Selat Malaka, masing-masing negara mendirikan incident hotline station, yakni di Sabang, Dumai (Indonesia), Lumut (Malaysia), Phuket (Thailand), dan Changi (Singapura).

Upaya yang signifikan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah

adanya prosedur operasi standar terhadap Selat Malaka. Perjanjian ini dibuat oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 21 April 2006. Perjanjian ini memperbolehkan kapal patroli dari negara partisipan untuk melintasi laut teritorial negara lain ketika pengejaran kapal terlibat dengan kejahatan maritim, tetapi kapal patroli tidak diperbolehkan untuk menembak atau melakukan tindakan militer (http://seskoal.tnial.mil.id/musik/DW1512011(finish%20UTUH).pdf diakses pada 29 Juni 2016).

Pada 16-18 Juli 2010 Jajaran TNI Angkatan Udara Indonesia bersama tiga negara yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand menggelar patroli gabungan yaitu *Eyes In The Sky* untuk mempertinggi keamanan di jalur perairan dan selat itu sendiri, dengan melibatkan pesawat Patroli Maritime atau *Maritime Patrol Aircraft* (MPA) dari masing-masing negara. EIS Sendiri merupakan suatu sistem terbuka dengan persetujuan yang telah disepakati ketiga negara tetangga tersebut dalam rangka menjaga stabilitas keamanan diwilayah perbatasan masing-masing negara (http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/2129-tni-au-gelarpatroligabungan.html diakses pada 9 Mei 2016).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menjaga keamanan wilayah Selat Malaka melalui Patroli *Eyes In The Sky* (EiS) maka, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis adalah penelitian Achmad Insan Maulidi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul *"Kerjasama Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menangani masalah*

pembajakan di Selat Malaka" Dalam penelitian ini Achmad membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan banyaknya pembajakan di laut seperti faktor geografis, faktor ekonomi dan faktor politik laut, Achmad juga membahas mengenai patroli terkoordinasi yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka dari kasus pembajakan dan poin-poin yang terkandung di dalamnya adalah keuntungan dari patroli terkoordinasi, kelemahan dari patroli terkoordinasi, hambatan dari patroli terkoordinasi dan juga sejauh mana keberhasilan dari patroli terkoordinasi yang dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura di wilayah Selat Malaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad ini mempunyai kesimpulan bahwa pada dasarnya penegakan keamanan di laut merupakan fungsi yang sangat mahal dan kompleks, sehingga di dunia ini tidak ada satupun yang mampu mewujudkan jaminan keamanan laut hanya oleh satu institusi atau negara secara mandiri. Untuk mencapai hasil yang sempurna dan efisien, intinya adalah keterpaduan, dengan menyatukan kekuatan seluruh kemampuan dengan instansi-instansi yang mempunyai kewenangan di laut. Indikator dari keterpaduan itu adalah terwujudnya kerjasama tim (*team work*) yang kompak, dan hal itu dapat terwujud hanya apabila dilandasi rasa saling percaya *(mutual trust)* dan saling menghargai kemampuan *(competence)* masing-masing instansi yang terlibat dalam upaya penegakan hukum di laut. Dengan berjalannya patroli terkoordinasi triteral yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang termasuk negara pantai Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura serta mengalami permasalahan yang sama yaitu menghadapi gangguan keamanan pelayaran oleh tindak pembajakan,

diharapkan kegiatan patroli ini dapat mengurangi tindak kejahatan itu sehingga hal ini dapat menghapus ketidakmampuan negara-negara pantai Selat Malaka ini dalam rangka menangani masalah keamanan di perairan Selat Malaka.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Arif Budi Setawan dari Universitas Indonesia pada tahun 2010 dengan judul *"Kerjasama Pengelolaan wilayah perbatasan Selat Malaka Indonesia-Malaysia"* dalam penelitiannya Arif membahas mengenai Permasalahan Pencurian Ikan *(Ilegal Fishing)*, Masalah Pembajakan dan Perampokan, masalah penyeludupan dan Lalu Lintas Narkoba serta Isu-isu mengenai Terorisme, dan beberapa faktor penting dalam kerjasama anatara Indonesia dan Malaysia juga Dampak dari kerjasama Pengelolaan wilayah Selat Malaka.

Dalam penelitiannya Arif juga menarik kesimpulan bahwa kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka anatara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu upaya untuk mengamankan potensi sumber daya Selat Malaka serta mengamankan Selat Malaka dari berbagai isu dan permasalahan yang dapat merugikan Indonesia dan Malaysia, Kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka juga merupakan satu upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang beberapa tahun belakangan memanas akibat berbagai isu, seperti masalah pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia, perebuatan Pulau Sipadan-Ligitan, konflik blok ambalat dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa faktor penghambat kerjasama pengelolaan wilayah Selat Malaka dapat berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto Ginting dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul "Kerjasama Regional Dalam Memberantas Piracy dan Armed Roberry di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka" okus dari skripsi ini adalah membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh negara pantai dalam memberantas pembajakan di laut. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menyatakan bahwa pembajakan harus terjadi di laut lepas di luar yurisdiksi suatu negara. Namun demikian, saat ini berkembang bentuk pembajakan baru di mana pembajakan tidak terjadi di laut lepas melainkan di perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan, contohnya yang ada di Selat Malaka. Selain di Selat Malaka pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan sendiri masih terdapat perdebatan mengenai apakah pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan masuk ke dalam pembajakan sebagaimana di maksud oleh UNCLOS 1982. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas piracy dan armed robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul "***Kerjasama Indonesia-***

Malaysia-Singapura melalui Patroli Eyes In The Sky Untuk Menjaga Keamanan Wilayah Selat Malaka” .

Adapun ketertarikan penulisan untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, di antaranya:

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, dalam mata kuliah ini mempelajari interaksi yang dilakukan antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura terletak di kawasan Asia Tenggara dan seringkali terjadi interaksi oleh ketiga negara.
2. Studi Keamanan Internasional, memberikan pemahanan tentang bagaimana situasi keamanan yang ada dalam setiap situasi konflik politik yang dimana ancaman sering sekali muncul dari luar seperti ancaman militer, sosial, ekonomi di wilayah perairan Selat Malaka.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah skripsi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana kerjasama Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui patroli *Eyes In the Sky* untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka” Dalam rangka mempermudah penulisan dan sekaligus memperjelas pemahaman, pertanyaan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam pertanyaan minor sebagai berikut:

1. Tindakan apa saja yang dilakukan Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melaksanakan patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan Selat Malaka?
3. Efektifkah program patroli *Eyes In The Sky* yang dilakukan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menjaga keamanan Selat Malaka?

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam program patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka ini sudah berlangsung sejak tahun 2005 hingga sekarang ini, akan tetapi tulisan ini hanya dibatasi dalam kurun waktu 10 tahun (2005-2015) dari mulai pembentukan kerjasama patroli *Eyes In The Sky* ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 hingga sekarang ini patroli masih berjalan dan terjadi penurunan kejahatan sekitar 70% pada tahun 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai kerjasama yang di jalin oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui program patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan di wilayah Selat Malaka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui patroli *Eyes In the Sky* untuk menjaga keamanan wilayah Selat Malaka.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melaksanakan patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan wilaya Selat Malaka.
3. Untuk mengetahui Efektifitas program patroli *Eyes In The Sky* yang dilakukan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menjaga keamanan wilayah Selat Malaka.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui patroli *Eyes In The Sky* untuk menjaga keamanan di wilayah Selat Malaka.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagai penstudi Hubungan Internasional.